



# TRI BHAKTI BUSINESS SCHOOL



## **Modul Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan**

**Program Studi Manajemen  
Dr. Eddy Setyanto, S.Sos., M.Si.**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  
Tri Bhakti  
2023

## **Kata Pengantar**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa untuk segala rahmat dan karunianya nya sehingga penulis dapat menyelesaikan modul Pendidikan Kewarganegaraan ini. Semoga modul ini dapat dipergunakan sebagai bahan pembelajaran bagi para mahasiswa dalam mempelajari pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam penyelesaian modul ini penulis juga banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengusapkan banyak terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan sebesar besarnya kepada; 1. Yayasan Prima Bina Bangsa 2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti. 3. Staf /karyawan/Dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu sehingga penulis dapat menyelesaikan modul ini. Penulis menyadari modul ini masih banyak kekurangan , untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Akhir katasemoga modul Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Bekasi, 20 April 2023



Dr. Eddy Setyanto, M.Si



**STIE TRI BHAKTI**  
TRI BHAKTI BUSINESS SCHOOL

Jl. Teuku Umar No.24, Cut Meutia  
Kota Bekasi, Jawa Barat 17114

(021) 82429400

tribhakti@stietribhakti.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: 010/ST-KTB/WK-I/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Drs. Widayatmoko, MM., M.I.Kom  
**Jabatan** : Ketua

Dengan ini menugaskan kepada nama di bawah ini untuk Penyusunan Modul pada Program Studi Manajemen STIE Tri Bhakti, sebagai berikut:

**Nama** : Dr. Eddy Setyanto, S.Sos., M.Si  
**Modul** : Pendidikan Kewarganegaraan

Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Finalnya berupa Softcopy dan hardcopy kepada Ketua STIE Tri Bhakti paling lambat 23 April 2023.

Demikian penugasan ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Bekasi, 10 Januari 2023

Ketua STIE Tri Bhakti

**Drs. Widayatmoko, MM., MM., M.I.Kom**

Tembusan:

1. Yth. Pengurus Yayasan Prima Bina Bangsa;
2. Arsip.



**STIE TRI BHAKTI**  
TRI BHAKTI BUSINESS SCHOOL

Jl. Teuku Umar No.24, Cut Meutia  
Kota Bekasi, Jawa Barat 17114

(021) 82429400

tribhakti@stietribhakti.ac.id

### SURAT PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Widayatmoko, MM., M.I.Kom  
Jabatan : Ketua STIE Tri Bhakti  
NIDN : 0303045901  
Pangkat : Lektor Kepala

Menyatakan bahwa Modul Pendidikan Kewarganegaraan adalah benar dipakai untuk bahan ajar Mata Kuliah Kewarganegaraan yang ditulis oleh Dr. Eddy Setyanto, S.Sos., M.Si.

Demikian surat pengesahan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 23 April 2023

Ketua STIE Tri Bhakti,

Drs. Widayatmoko, MM., M.I.Kom

## Ucapan Terimakasih

Dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas selesainya pembuatan Modul kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Yayasan Prima Bina Bangsa dalam hal ini Ibu Pembina, Ketua Yayasan , Badan Pengawas dan Staf Khusus Yayasan, Ketua STIE Tri Bhakti beserta jajarannya dan seluruh komunitas akademik dan non akademik di Kampus STIE Tri Bhakti atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan dalam proses penyusunan modul kuliah Pendidikan Panca Kewarganegaraan ini.

Tak lupa pula, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan dukungan dalam proses penyusunan modul ini. Setiap sumbangan dan kolaborasi yang diberikan telah membantu memperbaiki dan menyempurnakan isi modul agar lebih berkualitas.

Akhir kata, kami sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah terlibat dalam proses penyusunan modul ini. Semoga kerjasama kita dapat terus berlanjut di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Hormat kami,



Dr. Eddy Setyanto.,M.Si

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	I
<b>Surat Tugas</b> .....	II
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	III
<b>Ucapan Terimakasih</b> .....	IV
<b>Daftar Isi</b> .....	V
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan .....	1
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan .....	4
Latihan .....	5
<b>BAB II IDENTITAS NASIONAL</b> .....	6
Pengertian Identitas Nasional.....	6
Identitas Nasional dan Karakter Bangsa .....	7
Identitas Nasional Negara .....	8
Latihan .....	8
<b>BAB III INTEGRASI BANGSA</b> .....	9
Konsep Integrasi .....	9
Upaya Mencapai Integrasi Bangsa.....	10
Latihan .....	11
<b>BAB IV KONSTITUSI NEGARA</b> .....	12
Konsep Dasar .....	12
Konstitusi Dalam kehidupan berbangsa dan Bernegara.....	12
Indonesia adalah Negara Hukum .....	14
Latihan .....	14
<b>BAB V HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA</b> .....	15
Hak Warga Negara.....	15
Kewajiban Warga Negara .....	16
Latihan .....	18
<b>BAB VI DEMOKRASI INDONESIA</b> .....	19
Konsep dan Prinsip Demokrasi.....	19
Masyarakat Madani.....	20
Latihan .....	22
<b>BAB VII HUKUM DAN HAM DI INDONESIA</b> .....	23
Konsep Negara Hukum.....	23
Konsep Hak Asasi Manusia .....	24
Latihan .....	25
<b>BAB VIII WAWASAN NUSANTARA</b> .....	26
Konsep Wawasan Nusantara.....	26

Implementasi Wawasan Nusantara .....	27
Latihan .....	29
<b>BAB IX GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI WILAYAH .....</b>	<b>30</b>
Konsep Geopolitik .....	30
Konsep Geostrategi.....	31
Latihan .....	32
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
<b>HASIL SCANNING SIMILARITY TURNITIN .....</b>	<b>34</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>35</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Penulisan modul Pendidikan Kewarganegaraan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa yang terkait dengan bahan pembelajaran di kelas. Dengan tersedianya modul pembelajaran ini akan memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan ilmu pengetahuan .

Modul ini terdiri dari sebelas Bab yang meliputi: (1) Pendahuluan; (2) Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan; (3) Identitas nasional; (4) Integrasi Nasional; (5) Konstitusi Negara; (6) UUD 1945; (7) Hak dan Kewajiban Warga Negara; (8) Demokrasi Pancasila; (9) Hukum dan HAM; (10) Wawasan Nusantara; (geopolitik dan Geostrategi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Diharapkan dengan digunakannya modul ini pada mahasiswa program reguler, shift dan kelas malam di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti dapat menjadi pegangan dan arah materi pada pembelajaran khususnya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

### **Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan**

Agar keyakinan dan budaya suatu bangsa dapat bertahan dan tertanam dalam kehidupan masyarakatnya, maka pendidikan yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, misalnya, harus dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar tersebut. Kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia dirancang untuk memasukkan informasi, keterampilan, dan pengembangan sikap, perilaku, dan kepribadian. Sifat dan kepribadian masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan lingkungan yang ada di masyarakat. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan untuk:

1. Menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air: Mahasiswa dididik untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi Indonesia dan Pancasila.
2. Menumbuhkan sifat dan sikap yang baik di kalangan mahasiswa merupakan harapan dari Pendidikan kewarganegaraan yang membantu

menumbuhkan sifat seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi. Mahasiswa dididik untuk berpikir kritis tentang masalah nasional dan global.

3. Mengajarkan partisipasi demokratis: Berdasarkan prinsip Pancasila dan UUD 1945, siswa belajar cara berinteraksi dengan negara dan sesama warga negara.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan memiliki latar belakang etimologis, yuridis, dan terminologis. Pendidikan kewarganegaraan juga sangat penting. Dalam mengembangkan kemampuan dan potensi seseorang secara sadar dan terencana. Pengertian mengenai etimologis, yuridis, dan terminologis terkait Pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut:

1. **Etimologis:**

- Secara etimologis, istilah “pendidikan kewarganegaraan” berasal dari kata “pendidikan” dan “kewarganegaraan”.
- “Pendidikan” merujuk pada usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan dan potensi individu.
- “Kewarganegaraan” berkaitan dengan segala hal yang terkait dengan warga negara, hukum, dan politik.

2. **Yuridis:**

- Landasan yuridis pendidikan kewarganegaraan tercantum dalam aturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

3. **Terminologis:**

- Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya.
- Pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua juga menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan.

Sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tentang pembentukan nilai-nilai dan sikap kepribadian dimasukkan dalam ; Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Ilmu sosial Budaya dasar, Bahasa Indonesia, Ilmu Alamiah dasar dan Pendidikan

Pancasila. Kelompok bidang pengajaran itu disebut dengan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

### **Dasar Hukum Pendidikan Kewarganegaraan**

Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk pendidikan kewarganegaraan. Hal ini membuat pendidikan kewarganegaraan di berbagai tingkat pendidikan berjalan dengan baik .. Ada beberapa landasan hukum yang mengatur tentang Pendidikan Kewarganegaraan antara lain;

1. UUD 1945 (UUD 1945) pada Pasal 27 ayat (1) menyatakan persamaan kedudukan warga negara dalam urusan hukum dan pemerintahan. Pasal 30 ayat 1 menguraikan hak dan tanggung jawab warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 menyatakan warga negara berhak memperoleh pendidikan(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 2003).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 di Indonesia menguraikan tanggung jawab warga negara dalam melindungi negara.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan pendidikan kewarganegaraan dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan Keputusan Nomor 267/DIKTI/KEP./2000 untuk menyempurnakan kurikulum inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Kewarganegaraan (2003) pada perguruan tinggi di Indonesia, dengan fokus pada pengaturan kurikulum pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi

Landasan hukum ini meningkatkan peran pendidikan kewarganegaraan sebagai sumber pembelajaran penting untuk meningkatkan patriotisme dan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab warga negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai landasan sejarah dalam perjuangan kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia, di samping landasan hukumnya.

## **Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki tujuan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kesadaran warga negara khususnya dalam hal ini mahasiswa. Berikut adalah beberapa tujuan pendidikan kewarganegaraan:

Tujuan Secara Umum:

- Menumbuhkan kesadaran warga negara dan berwawasan kenegaraan.
- Membentuk perilaku dan sikap cinta tanah air.
- Mengajarkan nilai-nilai kebudayaan bangsa dan wawasan nusantara.
- Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, mandiri, maju, dan bertanggung jawab.

Tujuan Secara Khusus:

- Membekali generasi muda dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- Mengajarkan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia.

Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan kesadaran untuk berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara.

Sedangkan untuk Visi dari pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa adalah:

- Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas, relevan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Misi dari pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa meliputi:

- Mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik tentang konsep-konsep dasar kewarganegaraan, seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, demokrasi, HAM, dan wawasan nusantara 1.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu berperan aktif dalam pembangunan negara.

Terminologi pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan berbagai terminologi yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di

Indonesia. Berikut beberapa istilah terkait: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan kurikulum pendidikan yang berpusat pada demokrasi politik suatu negara yang dilengkapi dengan sumber pengetahuan tambahan. Pendidikan PKn mendidik berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan jati diri bangsa. Terminologi Pendidikan Kewarganegaraan adalah istilah bahasa Inggris yang biasa digunakan sebagai sinonim untuk pendidikan kewarganegaraan.

1. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia, termasuk cita-cita inti eksistensi berbangsa dan bernegara.
2. UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara.
3. Semboyan nasional Indonesia adalah “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya “Beragam namun tetap satu”.
4. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan ditentukan oleh mayoritas dengan tetap menjamin perlindungan hak-hak minoritas.
5. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak asasi yang dimiliki setiap orang tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun.
6. Wawasan keanekaragaman budaya, geografi, dan sejarah Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya yang mempunyai nilai positif dari budaya, lingkungan, pendidikan, sekolah, masyarakat dan keluarga (Kalidjernih and Winarno 2019) . Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa sebagai warga negara tentang hak dan kewajiban dan nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pendidikan kewarganegaraan mencakup tentang nilai Pancasila sebagai dasar negara dan idiologi bangsa

### **Latihan**

- Nama :
- NIM

Tuliskan ringkasan pemahaman materi pada Bab I:

1. ....
2. ....
3. ....

## **BAB II**

### **IDENTITAS NASIONAL**

#### **Pengertian Identitas Nasional**

Identitas nasional adalah konsep tentang jati diri bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam identitas nasional terdapat nilai-nilai budaya, sejarah dan karakter yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Secara singkat identitas nasional sebagai berikut:

1. Pengertian Identitas nasional;

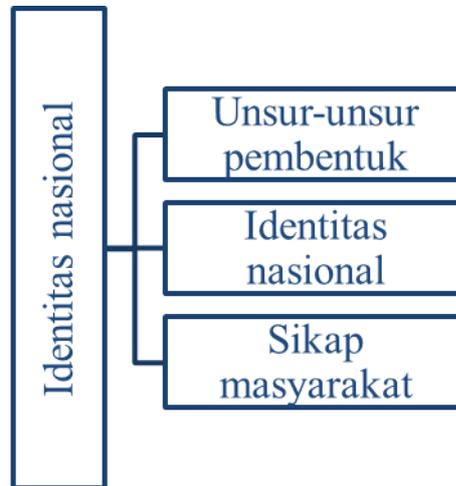
Identitas Nasional memiliki unsur penting yaitu:

- a. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang digunakan secara resmi di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Bendera Merah Putih sebagai simbol negara kesatuan Republik Indonesia.
- c. Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Garuda Pancasila sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia yang melambangkan ketuhanan, beradab, keberanian, keadilan dan persatuan
- e. Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa tentang keberagaman yang bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
- f. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”: Semboyan ini mengajarkan tentang keberagaman yang bersatu dalam satu kesatuan.
- g. Dasar Falsafah Negara “Pancasila”: Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai luhur dan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Juliardi (2014) identitas nasional dapat dibagi menjadi dua bagian;

1. Identitas suku bangsa (*Cultural Unity*) , pada bagian ini cultural unity disatukan oleh kesamaan budaya baik itu suku, ras, kepercayaan, adat, keturunan dan daerah. Pada bagian ini yang sangat membedakan dengan bangsa lain

2. Identitas kebangsaan ( *Political Unity*) pada bagian ini bangsa dalam arti politik, primordial yang sama menciptakan terbentuknya bangsa untuk membuat suatu negara. Suatu negara perlu menciptakan suatu ciri yang baru untuk bangsa yang disebut identitas nasional.



Identitas Nasional memiliki parameter yang digunakan sebagai alat ukur yang membedakan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain. Parameter yang sangat jelas terlihat antara lain adalah norma, suku, adat istiadat, letak geografis dan budaya.

Suku bangsa di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menurut data sekitar 300 suku. Dan setiap suku memiliki budaya, norma dan adat istiadat yang berbeda. Dengan demikian jelas terlihat bahwa negara Indonesia memiliki beragam identitas suku namun mampu mengintegrasikan ke dalam suatu Negara Indonesia demi mewujudkan negara yang adil dan makmur dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan diikat oleh Bhineka Tunggal Ika.

Kondisi geografis yang merupakan salah satu parameter identitas nasional menunjukkan bahwa letak suatu negara dalam wilayah yang disepakati. Letak geografis ini menjadi ciri penentu yang dimiliki sebagai batas wilayah suatu negara.

### **Identitas Nasional dan Karakter Bangsa**

Karakter bangsa dapat diartikan sebagai watak khas suatu bangsa, setiap bangsa di dunia memiliki identitas tersendiri. Secara sosiologis karakter merupakan salah

satu pembentuk dari identitas nasional. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa identitas nasional akan membentuk karakter suatu bangsa.

Menurut Arwiyah (2014) ciri karakter bangsa Indonesia sebagai berikut;

1. Percaya dan beriman terhadap Tuhan yang Maha Esa
2. Mencintai sesamanya, baik itu lingkungan , keluarga, masyarakat dan tanah airnya.
3. Saling menghormati manusia tanpa melihat latar belakangnya.
4. Menciptakan kerukunan hidup bersama dalam masyarakat majemuk dengan perbedaan yang ada.

### **Identitas Nasional Negara**

Identitas negara adalah identitas yang bersifat nasional dan menyeluruh. Identitas negara Republik Indonesia antara lain;

1. Lambang negara Garuda Pancasila
2. Bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia
3. Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara
4. Merah Putih adalah bendera negara
5. Pancasila sebagai dasar falsafah negara
6. Bentuk negara kesatuan
7. Budaya lokal yang diterima sebagai budaya daerah
8. UUD 1945 adalah hukum dasar ( Konstitusi)

### **Latihan**

- Nama :
- NIM

Tuliskan ringkasan pemahaman materi pada Bab II:

1. ....
2. ....
3. ....

## **BAB III**

### **INTEGRASI BANGSA**

#### **Konsep Integrasi**

Integrasi bangsa merupakan suatu proses yang penting dalam membangun persatuan dan kesatuan di dalam suatu negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Integrasi bangsa bukanlah tugas yang mudah, namun sangat penting untuk menciptakan harmoni dan stabilitas dalam masyarakat. Dalam makalah ini, akan dibahas mengenai pentingnya integrasi bangsa serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencapainya.

#### **Pentingnya Integrasi Bangsa**

Integrasi bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam membangun persatuan dan kesatuan di dalam suatu negara. Beberapa alasan mengapa integrasi bangsa penting antara lain:

1. Menciptakan Identitas Nasional, Integrasi bangsa membantu dalam membentuk identitas nasional yang kuat. Dengan adanya integrasi, masyarakat dapat merasa memiliki identitas yang sama sebagai warga negara yang satu. Identitas nasional yang kuat akan memperkuat rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap negara.
2. Membangun Toleransi dan Menghormati Keberagaman, Integrasi bangsa juga penting dalam membangun toleransi dan menghormati keberagaman. Dalam masyarakat yang heterogen, adanya integrasi akan membantu masyarakat untuk saling menghormati perbedaan budaya, suku, agama, dan bahasa. Hal ini akan menciptakan harmoni dan mengurangi konflik antar kelompok.
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Sosial, Integrasi bangsa juga berperan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam masyarakat yang terintegrasi, kerjasama antar kelompok akan lebih mudah terjadi. Hal ini akan memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **Upaya Mencapai Integrasi Bangsa**

Menurut Ismail (2019), pentingnya integrasi bangsa adalah hadirnya rasa kebersamaan yang disebabkan oleh persamaan nasib, keadaan, kepentingan, keperluan dan keinginan sebagai manusia.

Untuk mencapai integrasi bangsa, diperlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pendidikan Multikultural, Pendidikan multikultural merupakan salah satu upaya penting dalam mencapai integrasi bangsa. Melalui pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, menghormati keberagaman, dan memperkuat identitas nasional, generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang baik tentang pentingnya integrasi bangsa.
2. Dialog Antar Kelompok, Dialog antar kelompok juga merupakan upaya yang penting dalam mencapai integrasi bangsa. Dengan adanya dialog, masyarakat dapat saling berkomunikasi, memahami perbedaan, dan mencari solusi bersama untuk masalah yang dihadapi. Dialog antar kelompok juga dapat membantu mengurangi stereotip dan prasangka negatif antar kelompok.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mencapai integrasi bangsa. Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang inklusif, menghormati keberagaman, dan melindungi hak-hak semua kelompok masyarakat. Kebijakan yang adil dan merata akan membantu menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara.

Dengan demikian Integrasi bangsa merupakan proses yang penting dalam membangun persatuan dan kesatuan di dalam suatu negara. Pentingnya integrasi bangsa terlihat dari peranannya dalam menciptakan identitas nasional, membangun toleransi, dan meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk mencapai integrasi bangsa, diperlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan, seperti pendidikan multikultural, dialog antar kelompok, dan kebijakan pemerintah yang inklusif. Dengan adanya integrasi bangsa, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan saling menghormati dalam keberagaman.

Hukum yang terdapat dalam suatu konstitusi mengatur hal-hal yang sangat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan sebagai hukum dasar yang menjasi pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara

**Latihan**

- Nama :
- NIM

Tuliskan ringkasan pemahaman materi pada Bab III:

1. ....
2. ....
3. ....

## **BAB IV**

### **KONSTITUSI NEGARA**

#### **Konsep Dasar**

Konstitusi adalah hukum aturan dasar suatu negara atau disebut fundamental. Aturan dasar ini menjadi rujukan untuk aturan-aturan hukum dibawahnya. Konstitusi bersifat tertulis dan tidak tertulis. Di negara kita republik Indonesia Undang-Undang dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis yang mengatur prinsip dasar negara.

Konstitusi mempunyai tujuan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsi dan tujuan antara lain;

1. Mengatur pembagian kekuasaan.
2. Menjamin hak asasi Manusia
3. Mengatur proses pembentukan Hukum
4. Mengatur batas kekuasaan
5. Menetapkan stuktur negara

Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Menurut Thaib (2008) Konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituer* yang berarti membentuk suatu negara. dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *constitution*. Dalam prakteknya istilah ini mempunyai arti lebih luas dari pengertian Undang Undang Dasar, namun ada juga yang menyamakan dengan Undang Undang dasar. Menurut Prof Mahfud MD (2000), konstitusi adalah pembentukan suatu negara atau menyusun suatu negara dan menjadi peraturan dasar mengenai pembentukan negara

#### **Konstitusi Dalam kehidupan berbangsa dan Bernegara**

Dalam kehidupan bangsa dan negara, konstitusi memainkan peran penting. Berikut adalah beberapa cara konstitusi memengaruhi kehidupan sehari-hari kita:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Konstitusi memberikan hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas keadilan, pendidikan, dan kebebasan berbicara. Hak-hak ini mungkin tidak terlindungi jika tidak ada konstitusi.
2. Pembentukan Hukum: Proses pembentukan hukum diatur oleh Konstitusi. Prinsip-prinsip konstitusi menentukan undang-undang dan peraturan yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita.
3. Pembagian Kekuasaan: Konstitusi menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara cabang-cabang pemerintahan dan pemerintah federal. Ini menjaga keseimbangan dan mencegah penggunaan kekuasaan yang berlebihan.
4. Struktur Negara: Konstitusi mengatur struktur negara, yang mencakup sistem pemerintahan dan pembagian wilayah administratif. Ini memengaruhi sistem pemerintahan lokal dan nasional.

Dinamika konstitusi di negara kita dapat dilihat dari tabel berikut;

**Tabel : Dinamika Konstitusi di Indonesia**

<b>Konstitusi</b>	<b>Periode Waktu</b>
Masa kemerdekaan :UUD NRI 1945	18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi.
Konstitusi RIS 1949	27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950
UUDS 1950	17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama)	5 Juli 1959 sampai dengan 1965
UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru)	1966 sampai dengan 1998

## **Indonesia adalah Negara Hukum**

Negara Republik Indonesia adalah negara yang telah menetapkan diri sebagai negara yang berlandaskan hukum. Konsep negara yang berlandaskan hukum didasarkan pada suatu keyakinan bahwa negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang telah disepakati yang adil dan baik bagi seluruh warga negara. Dalam suatu negara hukum memiliki syarat bahwa suatu tindakan dari kegiatan negara memiliki tujuan antara lain;

1. Menegakkan kepastian hukum
2. Keseimbangan kekuasaan
3. Konstitusi Negara
4. Peradilan administrasi

Terwujudnya negara Indonesia yang berlandaskan hukum harus didukung oleh seluruh warga negara dan beserta seluruh komponen masyarakat. Hukum bukan hanya menjadi tujuan namun menjadi tatanan yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah dan seluruh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa keberadaan negara didasarkan pada landasan hukum dan Pancasila sebagai dasar negara.

### **Latihan**

- Nama :
- NIM

Tuliskan ringkasan pemahaman materi pada Bab IV:

1. ....
2. ....
3. ....

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA**

#### **Hak Warga Negara**

Sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Secara empiris negara melindungi dan menjamin hak dan kewajiban warga negara secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak yang dimiliki setiap warga negara mempunyai konsekuensi yang harus diterima. Tanggung jawab sebagai warga negara adalah mentaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partisipasi sebagai warga negara dalam setiap kegiatan kepegawaian dapat dipraktekkan dalam taat membayar pajak dan lain sebagainya. Kewajiban itu apabila tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi yang diatur oleh undang-undang yang berlaku di negara republik Indonesia. Kewajiban ini mengikat dan harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia.

#### **Hak dan Kewajiban Warga Negara di Indonesia**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, nilai-nilai dan norma sebagai landasan negara. Sebagai warga negara, kita mempunyai hak dan tanggung jawab yang diatur dalam UUD 1945. Dalam materi ini kita akan membahas tentang;

##### **1. Hak Warga Negara**

- Hak Ekonomi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- Hak Sosial: hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan
- Hak Politik : Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah
- Hak Pendidikan: Hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi
- Hak Beragama: Hak untuk memajukan diri sendiri secara kolektif demi hak-hak sambil memperjuangkan

##### **2. Tanggung jawab warga negara**

- Kekuasaan terhadap negara: Memenuhi tugas dan tanggung jawab warga negara, seperti membayar pajak dan mematuhi peraturan.

- Tanggung jawab terhadap warga negara: Memainkan peran aktif masyarakat dan negara dalam pengembangan Pancasila dan penanaman nilai-nilai.
  - Kewajiban Beragama: Melaksanakan ibadah keagamaan sesuai keyakinan agama masing-masing.
3. Keseimbangan Hak dan Tanggung Jawab
- Hak dan Tanggung Jawab adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya, hak atas kehidupan yang baik dan layak berbanding lurus dengan kewajiban bekerja dan berkontribusi pada kesejahteraan negara.
4. Peran pemerintah
- Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak dan memastikan bahwa warga negara memenuhi tanggung jawab mereka secara adil dan seimbang. Dalam menjalani kehidupan berbangsa, marilah kita menaati hukum dan berkontribusi secara positif. untuk kemajuan Indonesia.

### **Kewajiban Warga Negara**

Selain hak, terdapat juga kewajiban yang timbul dari hak tersebut. Tanggung jawab pekerjaan biasanya dipahami sebagai hal-hal yang harus dilakukan. Kewajiban dalam konteks ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dan dilaksanakan sebagai warga negara. Di Indonesia, setiap warga negara mempunyai hak yang diberikan oleh negara dan mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi dihadapan negara. Pada saat yang sama, konsep kewarganegaraan terdiri dari dua unsur dasar. Kata warga negara mencakup dua unsur konseptual: Pertama, warga negara adalah bagian dari negara (negara-kota). Mengacu pada konsep negara kota yang ada pada zaman Yunani kuno (kota Athena). Dahulu disebut Negara Polisi, namun di zaman modern telah menjadi negara bangsa yang demokratis dan revolusioner. Kedua, kenegaraan mensyaratkan bahwa kewajiban dan hak dapat direplikasi di berbagai tempat dan waktu, dan beberapa hak bersifat universal. Sebelum dilakukan amandemen UUD 1945, UUD 1945 juga telah mengatur hakikat warga negara dan penduduk Indonesia, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan negara dan kependudukan terkonsentrasi pada satu pasal, yaitu Pasal 26, yang

terdiri atas dua ayat: komputer pribadi 1 dan ayat 1. 2. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih ada satu pasal, namun ada 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 26 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3.

Kewajiban Warga Negara di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 . Negara kesatuan Republik Indonesia , sebagai negara yang berlandaskan hukum dan nilai-nilai Pancasila, mengatur kewajiban warga negaranya melalui Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara:

1. Menaati Hukum dan Pemerintahan:
  - Setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali
  - Tunduk pada undang-undang yang berlaku.
2. Ikut Serta dalam Upaya Pembelaan Negara:
  - Warga negara memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara
3. Menghormati Hak Asasi Manusia Orang Lain:
  - Kita harus menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
4. Bersikap Tertib dan Disiplin:
  - Warga negara diharapkan menjaga ketertiban dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari.
5. Menjaga Persatuan dan Kesatuan:
  - Kita harus berperan aktif dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Membantu Sesama:
  - Warga negara memiliki tanggung jawab untuk saling membantu dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.
7. Menghargai dan Melestarikan Lingkungan:
  - Kita harus menjaga lingkungan dan berperan aktif dalam pelestarian alam.

Kewajiban-kewajiban ini merupakan bagian integral dari peran kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan mematuhi dan melaksanakan kewajiban ini, kita berkontribusi pada kemajuan dan keberlanjutan negara kita

**Latihan**

- Nama :
- NIM

Tuliskan ringkasan pemahaman materi pada Bab V:

1. ....
2. ....
3. ....

## **BAB VI**

### **DEMOKRASI INDONESIA**

#### **Konsep dan Prinsip Demokrasi**

Demokrasi adalah sistem politik yang diterima secara luas di seluruh dunia karena penekanannya pada partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Namun, terlepas dari popularitasnya, demokrasi menghadapi banyak tantangan yang mengancam institusi dan nilai-nilainya. Dalam esai ini, kita akan mengkaji sejarah demokrasi, ciri-ciri utamanya, dan tantangan yang dihadapinya.

Demokrasi sebagai sistem politik berakar pada Yunani kuno, dimana warga negara berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip demokrasi berkembang dan diadopsi oleh masyarakat modern, yang mengarah pada pembentukan pemerintahan demokratis di seluruh dunia. Saat ini, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling diterima secara luas, dengan lebih dari separuh penduduk dunia tinggal di negara-negara demokratis. Namun, sistem demokrasi telah menghadapi banyak tantangan sepanjang sejarah, termasuk munculnya otoritarianisme, kesenjangan ekonomi, dan dampak globalisasi.

#### - Nilai Nilai Demokrasi

Demokrasi adalah sistem politik yang berdasarkan pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Ini adalah sistem yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam esai ini, kita akan mengeksplorasi nilai-nilai demokrasi yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kita akan mengkaji konteks sejarah dan budaya dari nilai-nilai ini, pentingnya nilai-nilai tersebut dalam masyarakat modern, serta tantangan dan kritik yang dihadapi nilai-nilai tersebut. Dengan melakukan hal ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran nilai-nilai demokrasi dalam membentuk masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai demokrasi merupakan prinsip-prinsip yang melandasi masyarakat demokratis. Nilai-nilai tersebut antara lain kebebasan berekspresi, supremasi hukum, dan hak individu. Kebebasan berekspresi adalah hak untuk menyatakan pendapat tanpa sensor atau pengekangan. Supremasi hukum berarti tidak ada

seorang pun yang berada di atas hukum, dan setiap orang tunduk pada sistem hukum yang sama.

### **Masyarakat Madani**

Masyarakat Madani adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembentukan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, keadilan, partisipasi aktif, serta toleransi, dengan inspirasi dari ajaran Islam. Konsep ini telah menjadi fokus perdebatan dan pengembangan dalam kajian sosial, terutama di dunia Muslim, di mana para ahli telah merumuskan pemahaman yang beragam.

Salah satu pemikir terkemuka yang berkontribusi dalam membangun pemahaman tentang masyarakat madani adalah Dr. Nurcholish Madjid, seorang intelektual Muslim Indonesia. Bagi Madjid, masyarakat madani adalah sebuah konsep yang menyiratkan kemajuan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, dan budaya, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan.

Dalam pandangan Madjid, masyarakat madani mencerminkan harmonisasi antara ajaran Islam dan nilai-nilai universal kemanusiaan. Hal ini mencakup prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta partisipasi aktif dalam proses pembangunan masyarakat. Masyarakat madani juga menekankan pentingnya pluralisme, di mana berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya dapat hidup bersama dalam kedamaian dan saling menghormati.

Selain itu, Dr. Muhammad Abdul Aziz Al-Attas, seorang sarjana Islam Malaysia, juga memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang masyarakat madani. Baginya, masyarakat madani adalah konsep yang menegaskan pentingnya kesadaran kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ini mencakup partisipasi aktif dalam pembangunan negara dan masyarakat, serta keterlibatan dalam upaya menjaga keadilan sosial dan lingkungan.

Dalam konteks global, konsep masyarakat madani juga telah menjadi pusat perhatian. Banyak ahli dan praktisi pembangunan mengakui pentingnya membangun masyarakat madani sebagai bagian dari upaya mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai negara dan wilayah.

Secara umum, masyarakat madani adalah sebuah visi tentang bagaimana sebuah masyarakat dapat berkembang secara harmonis, adil, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ini melibatkan partisipasi aktif semua elemen masyarakat dalam proses pembangunan, serta pengakuan terhadap pluralitas dan keberagaman sebagai sumber kekuatan dan kekayaan. Dengan demikian, konsep masyarakat madani terus menjadi sumber inspirasi dan perdebatan dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih baik di seluruh dunia.

Variabel dalam konteks masyarakat madani merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan, perkembangan, dan karakteristik dari sebuah masyarakat madani. Ini termasuk beragam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memainkan peran penting dalam mewujudkan visi masyarakat madani yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Berikut adalah beberapa variabel yang relevan dalam konteks masyarakat madani:

1. Partisipasi Politik: Tingkat partisipasi politik dari warga masyarakat merupakan salah satu variabel penting dalam masyarakat madani. Partisipasi ini mencakup pemilihan umum, referendum, demonstrasi, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan politik.
2. Kehidupan Beragama: Tingkat toleransi dan kerukunan antaragama serta kebebasan beragama menjadi variabel penting dalam masyarakat madani. Masyarakat yang menghormati keberagaman agama dan memberikan ruang bagi praktik keagamaan yang damai cenderung lebih mendukung pembentukan masyarakat madani.
3. Keadilan Sosial: Keadilan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan adalah variabel kunci dalam masyarakat madani. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang signifikan dapat menghambat pembentukan masyarakat madani yang inklusif.
4. Pendidikan dan Kesadaran Warga: Pendidikan yang berkualitas dan peningkatan kesadaran warga terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara merupakan variabel penting dalam pembentukan masyarakat madani. Warga yang terdidik cenderung lebih aktif dalam kehidupan politik dan sosial serta lebih mampu memperjuangkan hak-hak mereka.

5. **Kualitas Pemerintahan:** Kualitas pemerintahan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan, adalah variabel kunci dalam pembentukan masyarakat madani yang efektif. Pemerintahan yang kuat dan bersih dapat mempromosikan partisipasi publik dan menjamin perlindungan hak-hak warga.
6. **Media dan Kebebasan Berekspresi:** Kebebasan media dan kebebasan berekspresi adalah variabel penting dalam masyarakat madani. Media yang independen dan beragam memainkan peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan memfasilitasi diskusi publik yang sehat.
7. **Budaya Demokrasi:** Budaya yang mendorong penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi, seperti penghormatan terhadap pluralisme, dialog antarkelompok, dan rasa saling menghargai, adalah variabel penting dalam masyarakat madani. Budaya demokrasi yang kuat membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem demokrasi.
8. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan variabel penting dalam masyarakat madani. Perlindungan terhadap kebebasan sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian integral dari pembentukan masyarakat madani yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Variabel-variabel ini bersifat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Upaya untuk membangun masyarakat madani yang berkelanjutan dan inklusif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika sosial dan politik masyarakat, serta strategi yang efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.

**Latihan**

- Nama :
  - NIM
- Tuliskan ringkasan pemahaman materi pada Bab VI:
1. ....
  2. ....
  3. ....

## **BAB VII**

### **HUKUM DAN HAM DI INDONESIA**

#### **Konsep Negara Hukum**

Konsep Negara Hukum merupakan suatu konsep dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa negara harus berdasarkan pada hukum. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dan bahwa semua tindakan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ada beberapa karakteristik utama dari Negara Hukum:

1. **Supremasi Hukum:** Artinya hukum adalah yang tertinggi di atas segala bentuk kekuasaan, termasuk kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak ada individu atau kelompok yang di atas hukum.
2. **Kedaulatan Hukum:** Artinya keputusan pemerintah dan tindakan institusi publik lainnya harus didasarkan pada hukum yang ada dan proses yang ditetapkan oleh hukum tersebut.
3. **Perlindungan Hukum:** Artinya setiap individu memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dan memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan.
4. **Pemerintahan yang Terbuka dan Transparan:** Artinya kebijakan dan keputusan pemerintah harus dibuat secara transparan, dan warga negara memiliki hak untuk mengetahui dasar hukum dari keputusan tersebut.
5. **Pengendalian Kekuasaan :** Artinya kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia.
6. **Penegakan Hukum yang Adil dan Setara:** Artinya setiap individu harus diperlakukan sama di depan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik.

Negara Hukum memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan politik, sosial, dan ekonomi suatu negara, serta dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Prinsip-prinsip Negara Hukum juga merupakan dasar bagi sistem hukum modern di banyak negara di seluruh dunia.

## **Konsep Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep yang mendasar dalam hukum dan filosofi yang menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak dapat ditawar-tawar atau dicabut, hanya karena status, kebangsaan, atau keadaan lainnya. Konsep ini mengakui bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Hak Asasi Manusia mencakup beragam hak dan kebebasan yang diterima oleh individu secara inheren sebagai bagian dari kondisi kemanusiaan mereka. Konsep ini menjadi pijakan utama dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan beradab.

Salah satu aspek penting dari Hak Asasi Manusia adalah prinsip universalitas, yang menyatakan bahwa hak-hak ini berlaku untuk semua orang, tanpa pandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, atau kebangsaan. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada pembenaran bagi diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap individu berdasarkan perbedaan tersebut. Dalam kerangka universalitas ini, hak-hak tersebut juga dinyatakan sebagai inheren, artinya mereka melekat pada semua manusia secara alami dan tidak dapat dihilangkan.

Hak Asasi Manusia mencakup berbagai aspek, termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kolektif. Hak sipil dan politik mencakup hak-hak seperti kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, dan berpindah, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Di sisi lain, hak ekonomi, sosial, dan budaya melibatkan hak atas pendidikan, perumahan layak, pekerjaan yang layak, dan akses yang setara terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Hak-hak kolektif, seperti hak untuk mempertahankan budaya dan identitas etnis, juga diakui sebagai bagian penting dari Hak Asasi Manusia.

Penting untuk dicatat bahwa Hak Asasi Manusia bukanlah konsep yang statis; itu terus berkembang seiring waktu dan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berubah. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Hak Asasi Manusia telah memainkan peran penting dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak ini di tingkat global. Selain itu, banyak negara telah mengadopsi deklarasi, konvensi, dan perjanjian internasional untuk mengikat diri mereka pada standar Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional.

Namun, meskipun ada kemajuan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, tantangan yang signifikan tetap ada di seluruh dunia. Masalah seperti diskriminasi, ketidaksetaraan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia masih merajalela di banyak negara. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan upaya untuk memperjuangkan hak-hak ini dan memastikan bahwa mereka diakui, dihormati, dan dilindungi bagi semua orang, tanpa pengecualian.

Dalam konteks global yang semakin kompleks dan terhubung, penting bagi masyarakat internasional untuk bekerja sama dalam mendukung Hak Asasi Manusia. Ini melibatkan upaya bersama untuk mempromosikan kesadaran akan hak-hak ini, memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hak asasi manusia, dan mendorong adopsi kebijakan dan tindakan yang menghormati prinsip-prinsip HAM di seluruh dunia. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia tetap menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera bagi semua.

### **Latihan**

- Nama :
- NIM

Tuliskan ringkasan pemahaman materi pada Bab VII:

1. ....
2. ....
3. ....

## **BAB VIII**

### **WAWASAN NUSANTARA**

#### **Konsep Wawasan Nusantara**

Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep geopolitik yang berakar dalam pemahaman tentang keunikan dan keberagaman budaya, geografi, dan sejarah Indonesia. Istilah "Nusantara" merujuk pada wilayah-wilayah kepulauan di Asia Tenggara yang mencakup wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura, dan Timor Leste.

Konsep Wawasan Nusantara mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia serta kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi berbagai tantangan global. Beberapa prinsip utama dari konsep Wawasan Nusantara antara lain:

1. Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan: Wawasan Nusantara menekankan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di timur. Kesatuan ini penting untuk memperkuat identitas nasional serta memastikan kedaulatan dan keamanan negara.
2. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan: Konsep Wawasan Nusantara mendorong pengelolaan sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan generasi mendatang.
3. Kerjasama regional dan internasional: Wawasan Nusantara juga menekankan pentingnya kerjasama regional dan internasional dalam menghadapi tantangan-tantangan global seperti perdagangan, keamanan, dan lingkungan hidup.
4. Pengembangan maritim: Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi maritim. Konsep Wawasan Nusantara mendorong pengembangan sektor maritim sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia.

5. Kebhinnekaan dan keberagaman budaya: Wawasan Nusantara menekankan pentingnya menghargai keberagaman budaya dan agama di Indonesia sebagai sumber kekuatan dan kebanggaan nasional.

Konsep Wawasan Nusantara telah menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia serta menjadi landasan untuk mengembangkan kerjasama regional dan internasional di Asia Tenggara.

Wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Indonesia pertama, Soekarno, pada tahun 1950-an. Konsep ini menggambarkan pandangan strategis Indonesia terhadap wilayah maritimnya, yang meliputi kepulauan yang terbentang dari Sabang di sebelah barat hingga Merauke di sebelah timur. Wawasan Nusantara menggarisbawahi pentingnya laut sebagai penghubung antar-pulau dan sebagai sumber daya ekonomi yang besar.

Namun, dalam konteks hukum, tidak ada hukum spesifik yang secara langsung mengatur atau menyatakan Wawasan Nusantara. Namun demikian, konsep ini tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan wilayah laut dan perbatasan laut, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perairan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya laut dan pengelolaan wilayah laut Indonesia.

Selain itu, konsep Wawasan Nusantara juga memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam menentukan posisi negara dalam sengketa wilayah maritim dan dalam memperkuat kerja sama regional, seperti dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*).

### **Implementasi Wawasan Nusantara**

Wawasan Nusantara adalah konsep yang menggambarkan pandangan atau pemahaman yang mendalam tentang keberagaman, kekayaan, dan potensi yang dimiliki oleh wilayah Indonesia, yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Implementasi Wawasan Nusantara mencakup berbagai aspek mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan hidup. Dalam implementasinya, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat dan memperluas pemahaman serta penerapan konsep Wawasan Nusantara tersebut. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi Wawasan Nusantara memerlukan upaya dalam membangun kesadaran nasional tentang keberagaman budaya, bahasa, dan agama yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan nasional yang mengintegrasikan nilai-nilai persatuan, keragaman, dan cinta tanah air dalam kurikulumnya. Selain itu, pemerintah juga dapat mempromosikan kegiatan-kegiatan yang memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, seperti festival budaya, seminar nasional, atau kampanye sosial.
2. Implementasi Wawasan Nusantara juga melibatkan upaya dalam mengembangkan infrastruktur yang memperkuat konektivitas antar-pulau di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, serta memfasilitasi pertukaran budaya dan pengetahuan antar-daerah. Peningkatan konektivitas ini dapat dilakukan melalui pembangunan jaringan transportasi laut, udara, dan darat yang efisien dan terintegrasi.
3. Implementasi Wawasan Nusantara memerlukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis pada prinsip keberlanjutan akan memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati manfaatnya.
4. Perlunya keadilan dalam distribusi hasil eksploitasi sumber daya alam guna memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di daerah terpencil, mendapatkan manfaat yang adil dari kekayaan alam yang dimiliki oleh negara.

Selain itu, implementasi Wawasan Nusantara juga memerlukan upaya dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama regional dengan negara-negara tetangga. Kerjasama ini dapat meliputi berbagai bidang seperti perdagangan, keamanan, lingkungan hidup, dan pendidikan. Dengan menjalin kerjasama yang erat dengan negara-negara di kawasan, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam diplomasi regional dan global.

Terakhir, implementasi Wawasan Nusantara membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Semua pihak harus saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi Wawasan Nusantara bukanlah tanggung jawab

eksklusif dari pemerintah, namun merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia.

**Latihan**

- Nama :
- NIM

Tuliskan ringkasan pemahaman materi pada Bab VIII:

1. ....
2. ....
3. ....

## **BAB IX**

### **GEPOLITIK DAN GEOSTRATEGI WILAYAH**

#### **Konsep Geopolitik**

Geopolitik adalah studi yang mempelajari hubungan antara politik dan geografi, dengan fokus pada cara di mana faktor-faktor geografis seperti lokasi, sumber daya alam, dan topografi mempengaruhi kebijakan dan dinamika politik suatu wilayah. Konsep ini menjadi penting dalam menganalisis interaksi antara negara, perubahan wilayah, dan konflik internasional. Dalam konteks geopolitik, terdapat beberapa prinsip dan teori yang membentuk dasar pemikiran. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam geopolitik:

1. **Lokasi:** Lokasi geografis suatu negara dapat mempengaruhi kepentingan dan strategi politiknya. Negara-negara yang berada di persimpangan rute perdagangan atau di wilayah strategis memiliki kepentingan yang berbeda dalam hubungan internasional.
2. **Sumber Daya Alam:** Sumber daya alam seperti minyak, gas, dan logam berharga memainkan peran penting dalam geopolitik. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam sering kali menjadi pusat perhatian bagi negara-negara lain yang ingin mengamankan akses terhadap sumber daya tersebut.
3. **Topografi dan Perbatasan:** Topografi dan perbatasan suatu wilayah dapat mempengaruhi strategi militer dan keamanan nasional. Pegunungan, sungai, dan lautan dapat menjadi hambatan atau keuntungan dalam perencanaan militer dan kebijakan keamanan.
4. **Kekuatan Militer:** Kekuatan militer suatu negara memainkan peran penting dalam geopolitik. Negara-negara dengan kekuatan militer yang besar memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kebijakan luar negeri dan penyebaran pengaruh geopolitik mereka.
5. **Alliansi dan Sekutu:** Hubungan antara negara-negara dalam bentuk aliansi dan sekutu dapat memengaruhi dinamika geopolitik suatu wilayah. Sekutu-sekutu dapat memberikan dukungan strategis dan keamanan,

sementara aliansi dapat mempengaruhi perimbangan kekuatan di tingkat global.

6. **Kekuatan Ekonomi:** Faktor ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi asing, dan ketergantungan energi juga memainkan peran penting dalam geopolitik. Negara-negara dengan ekonomi yang kuat dapat menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk memengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan internasional.
7. **Ideologi dan Nilai:** Ideologi politik dan nilai-nilai budaya suatu negara juga dapat mempengaruhi geopolitik. Perbedaan ideologi dapat menjadi sumber konflik antara negara-negara, sementara kesamaan nilai-nilai dapat memperkuat aliansi dan hubungan internasional.
8. **Perubahan Iklim dan Lingkungan:** Perubahan iklim dan dampak lingkungan juga menjadi faktor penting dalam geopolitik modern. Persaingan atas sumber daya alam yang terbatas dan dampak perubahan iklim dapat memicu konflik dan mengubah dinamika kekuatan di tingkat global.

Dalam keseluruhan, geopolitik melibatkan analisis multidimensional terhadap interaksi kompleks antara faktor-faktor politik, ekonomi, militer, dan lingkungan di tingkat regional dan global. Pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ini penting bagi negara-negara dan aktor-aktor lain dalam mengembangkan strategi dan kebijakan yang efektif dalam konteks geopolitik yang terus berubah.

### **Konsep Geostrategi**

Geostrategi adalah studi tentang bagaimana faktor geografis mempengaruhi kebijakan dan strategi suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Konsep ini melibatkan analisis terhadap lokasi geografis, sumber daya alam, topografi, iklim, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kekuatan atau kelemahan suatu negara dalam konteks politik, ekonomi, dan militer. Dalam era globalisasi, geostrategi tetap menjadi aspek penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara.

Faktor geografis memainkan peran kunci dalam menentukan keunggulan kompetitif suatu negara dalam politik dan ekonomi global. Lokasi geografis yang strategis dapat memberikan akses terhadap sumber daya alam yang berharga, jalur

perdagangan, dan posisi militer yang kuat. Contohnya adalah selat yang penting secara strategis seperti Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia, serta Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan utama di Asia Tenggara.

Selain itu, topografi dan iklim juga dapat memengaruhi strategi militer suatu negara. Negara-negara dengan pegunungan tinggi atau hutan yang lebat mungkin lebih sulit untuk diinvasi, sementara negara-negara dengan iklim yang keras mungkin harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan keamanannya.

Geostrategi juga mempertimbangkan hubungan antara negara-negara di tingkat regional dan global. Pertikaian wilayah, perjanjian perdagangan, dan aliansi militer adalah contoh dari bagaimana faktor-faktor geografis mempengaruhi dinamika politik dan keamanan di tingkat internasional.

Pentingnya geostrategi tergambar dalam perencanaan kebijakan luar negeri suatu negara. Negara-negara sering kali berusaha untuk memanfaatkan keunggulan geografis mereka dan meminimalkan kerentanan mereka terhadap ancaman dari luar. Ini bisa melibatkan pembangunan infrastruktur, pengembangan kekuatan militer, atau pembentukan aliansi dengan negara-negara lain.

Namun, geostrategi juga menghadapi tantangan dalam era kontemporer. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah mengubah dinamika geopolitik dengan mempercepat pergerakan informasi dan barang, mengurangi jarak secara fisik, dan mempengaruhi kekuatan relatif antara negara-negara.

Dengan demikian, konsep geostrategi terus berkembang sesuai dengan perubahan dalam geopolitik global. Meskipun demikian, pengaruh faktor-faktor geografis terus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan kebijakan dan strategi suatu negara di tingkat internasional.

## **Latihan**

- Nama :
- NIM

Tuliskan ringkasan pemahaman materi pada Bab IX:

1. ....
2. ....
3. ....

## DAFTAR PUSTAKA

- Arwiyah, Yahya. 2014. *Civic Education Di Perguruan Tinggi Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Dahlan, Thaib. 2008. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail Nurdin, Sri Hartati. 2019. CV. Penerbit Qiara Media *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia)*. Bandung.  
<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>.
- Juliardi, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kalidjernih, Freddy K, and Winarno Winarno. 2019. “Dari Terminologi Ke Subtansi Pendidikan Kewarganegaraan: Implikasi Terhadap Revitalisasi Pancasila.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 16(1): 38–50.
- Mahfud MD, M. 2000. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.” 2003.

## HASIL SCANNING SIMILARITY TURNITIN

### Modul Kewarganegaraan

#### ORIGINALITY REPORT

**22%**  
SIMILARITY INDEX

**22%**  
INTERNET SOURCES

**7%**  
PUBLICATIONS

**7%**  
STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://artikelpendidikan.id">artikelpendidikan.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://geograf.id">geograf.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://lms-paralel.esaunggul.ac.id">lms-paralel.esaunggul.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://an-nur.ac.id">an-nur.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://zombiedoc.com">zombiedoc.com</a> Internet Source	<1%

## BIOGRAFI PENULIS



Dr. Eddy Setyanto, M.Si. lahir di Jakarta, 25 Oktober 1974. Lulus dari SMA 9 Yogyakarta dan melanjutkan studi S1 komunikasi. Melanjutkan program S2 Magister Administrasi di Universitas Diponegoro Semarang tahun 2007 dan menyelesaikan Program Doktor S3 dengan Beasiswa LPDP Kemenkeu RI di Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Pernah bekerja di BUMN PT Surveyor Indonesia dan Tenaga Ahli di Kemendikbud. Aktif sebagai nara sumber di berbagai pelatihan pada seminar nasional dan internasional. Menjadi pengajar sejak tahun 2009 sampai tahun 2022 di Unindra Jakarta. Dan saat ini aktif mengajar dan menjadi Kaprodi Manajemen serta merangkap Kepala LPPM di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tri Bhakti. Telah melakukan publikasi pada Jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Beberapa buku sudah diterbitkan dan juga sebagai reviewer pada jurnal Scopus Q1 dan jurnal nasional. Aktif di organisasi kemasyarakatan dan juga tergabung pada organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Asosiasi Dosen Indonesia.